

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa di pertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN atau BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kota (Itwilkab/Itwilkot) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Audit pemerintah adalah salah satu intansi pemerintah yang dapat menegakkan pemerintahan yang baik dan adil (*good government*), Namun demikian, didalam praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2000) dalam Taufiq (2010) menjelaskan terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintah di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan

publik tidak mudah diukur, dengan kata lain ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan di lingkungan pemerintah.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor ". Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (*tidak mudah dipengaruhi*), karena dia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Kualitas audit yang baik akan memberikan konsekuensi bagi pihak yang diaudit (*auditee*), salah satu bentuk konsekuensi yang dirasakan oleh pihak tersebut adalah kepuasan *auditee*. Basuki dkk. (2006) dalam Akmal (2010), menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit dilakukan pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensi seorang auditor dengan klien.

Kualitas audit yang dirasakan *auditee* diperoleh melalui pengalaman audit atau saat melakukan pemeriksaan audit. *Auditee* akan terkesan dan

merespon atas apa yang dialami termasuk dalam hal pengkomunikasian hasil pemeriksaan. Nilai yang dirasakan atas kualitas jasa audit akan terkait dengan harapan yang melekat pada diri *auditee*, yang kemudian menimbulkan kepuasan *auditee*. Demikian halnya juga untuk kualitas audit disektor pemerintah, yang memberikan pelayanan jasa audit terhadap instansi pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Selanjutnya audit pemerintah daerah tersebut dalam jasa auditnya melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999).

Penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk. (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo (1981) Deis dan Giroux (1992) dalam Mayangsari (2003). Selain itu, menurut Alim dkk. (2007) interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sukriah dkk. (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh objektivitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin tinggi tingkat objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil

pemeriksaannya. Pusdiklatwas BPKP (2005) menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seorang dari pengaruh dari pandangan subyek pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Objektivitas diduga berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Sukriah dkk. (2009) dalam Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor (*judgment*). Hal ini dipertegas oleh Haynes *et al.* (1998) dalam Herliansyah dkk. (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dimiliki auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (*judgment*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Brown dkk. (1983) dalam Mardisar dkk. (2007) perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs, 1992).

Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Penelitian yang dilakukan Sukriah dkk. (2009) menguji pengaruh integritas terhadap kualitas audit dan hasilnya tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maburi dan Winarna (2010) yang mendapatkan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi, independensi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka dimasyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab untuk menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan objektivitas mereka. Nugrahiningsih (1999) menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menguji pendekatan standar etika dengan profesi akuntan, kerangka kerja tersebut berdasarkan pada teori permainan (*game theory*) dengan melalui pembuatan opini oleh klien audit. Payamta (2002) menyatakan bahwa berdasarkan "*pedoman etika*" maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan profesionalnya. Prinsip tersebut adalah:

(1) integritas, (2) objektivitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) kemampuan profesional, (7) perilaku etika.

Mabruri dan Winarna (2010) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit dengan menggunakan sampel semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau Bawasda di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri, menyatakan bahwa objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin objektif auditor, semakin banyak pengalaman kerja, semakin banyak pengetahuan dan semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mabruri dan Winarna (2010). Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tahun pengamatan yang berbeda, yaitu tahun 2012.
3. Menambahkan variabel independen yaitu kompetensi.

## **B. Batasan Masalah**

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit dan diteliti dalam penelitian ini meliputi independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas auditor, dan kompetensi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
2. Apakah objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
4. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
5. Apakah integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
6. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh positif Independensi terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh positif Objektivitas terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh positif Pengalaman Kerja terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh positif Pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh positif Integritas Auditor terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh positif Kompetensi terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.



## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bidang Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang relevan terhadap bidang akuntansi di Indonesia, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Bidang Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan dan perusahaan akan pentingnya memperhatikan independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas auditor, dan kompetensi.